

# LAPORAN KINERJA

2024



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Tahun 2024 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan kepada KPKNL Palu selama periode tahun 2024. Laporan Kinerja KPKNL Palu disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas instansi KPKNL Palu pada pihak yang memberi amanah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu. Disamping itu, Laporan Kinerja juga dapat digunakan sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kualitatif serta wujud transparansi instansi dalam rangka terwujudnya *good governance*.

Selama tahun 2024, KPKNL Palu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis KPKNL Palu Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Palu Tahun 2024, terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja KPKNL Palu akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPKNL Palu.

KPKNL Palu berupaya untuk terus mengoptimalkan kinerja dalam mencapai visi dan misi agar amanah yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Selama tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palu mencapai 114,91%.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Palu Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai pertanggungjawaban KPKNL Palu atas upaya pencapaian visi dan misi yang dibebankan pada tahun 2024.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Palu



Ditandatangani secara elektronik  
Jerry Max Nelson Piri

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Tugas dan Fungsi .....	1
Struktur Organisasi .....	3
Peran Strategis .....	5
Isu Strategis .....	8
Tantangan / Hambatan .....	11
Sistematika Laporan .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
Rencana Strategis .....	13
Perjanjian Kinerja .....	14
Pengukuran Kinerja .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
Capaian Kinerja Organisasi .....	19
Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan .....	20
Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa .....	23
Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal .....	25
Sasaran Strategis 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien .....	26
Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif .....	27
Sasaran Strategis 6 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif .....	29

Sasaran Strategis 7 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional .....	31
Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif .....	31
Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel ...	33
Sasaran Strategis 10 : Komunikasi Publik yang Efektif .....	36
Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah .....	36
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	37
Kinerja Lainnya .....	38
Realisasi Anggaran .....	40
BAB IV PENUTUP .....	43
LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### TUGAS DAN FUNGSI KPKNL PALU

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL.

KPKNL Palu merupakan salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado. KPKNL Palu mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Palu menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

## STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALU

Bagan 1.1  
Struktur Organisasi KPKNL Palu



Salah satu kantor operasional DJKN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah KPKNL Palu yang berkedudukan di Kota Palu dengan wilayah kerja meliputi 13 kota/kabupaten yaitu:

1. Kota Palu,
2. Kabupaten Banggai,
3. Kabupaten Banggai Kepulauan,
4. Kabupaten Banggai Laut,
5. Kabupaten Buol,
6. Kabupaten Donggala,
7. Kabupaten Morowali,
8. Kabupaten Morowali Utara,
9. Kabupaten Parigi Moutong,

10. Kabupaten Poso,
11. Kabupaten Sigi,
12. Kabupaten Tojo Una-Una, dan
13. Kabupaten Toli-Toli.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, KPKNL Palu memiliki **sumber daya manusia** berjumlah **29 pegawai** dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

#### Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pelaksana	-	9	5	-	14
2.	Jabatan Fungsional	-	1	8	-	9
3.	Eselon IV	-	-	5	-	5
4.	Eselon III	-	-	-	1	1
Jumlah		-	10	18	1	29

Tabel 1.2

#### Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No.	Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	18-30	-	10	2	-	12
2.	31-40	-	-	10	-	10
3.	41-50	-	-	4	-	4
4.	> 50	-	-	2	1	3
Jumlah		-	10	18	1	29

Tabel 1.3

#### Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Laki-laki	-	5	13	1	19

2.	Perempuan	-	5	5	-	10
Jumlah		-	10	18	1	29

Tabel 1.4

### Komposisi Pegawai KPKNL Palu Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	-	-	3	-	3
2.	D I	-	1	-	-	1
3.	D III	-	9	-	-	9
4.	S 1/D IV	-	-	12	1	13
5.	S 2	-	-	3	-	3
Jumlah		-	10	18	1	29

## PERAN STRATEGIS KPKNL PALU

KPKNL Palu sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, visi dan misi organisasi sehingga tercapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. KPKNL Palu mempunyai peran/aspek strategis antara lain:

a. **Subbagian Umum** yang merupakan bagian penunjang tugas dan fungsi KPKNL dan mempunyai tugas di bidang kepegawaian diantaranya:

- Menyusun Daftar Urut Kependidikan (DUK) dan formasi pegawai;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian seperti DP3, laporan LP2P, dan KP4;
- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- Mengurus permintaan Kartu Taspem, Karpeg, Askes; dan
- Menyusun laporan absensi bulan kantor.

Sedangkan di bidang keuangan Subbagian Umum mempunyai tugas:

- Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berdasarkan dana yang tersediadalam DIPA dan
- Menyelenggarakan pembayaran gaji/TKPN dan/atau penghasilan lainnya.

Pada bagian Penatausahaan BMN/Inventaris Kantor serta Pengadaan Barang

dan Jasa, tugas Subbagian umum adalah:

- Menyelenggarakan inventarisasi BMN pada kantor pelayanan;
- Menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan barang/jasa keperluan kantor;
- Menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian barang keperluan kantor; dan
- Menyusun konsep rencana penghapusan barang inventaris kantor.

Subbagian Umum juga mempunyai tugas dalam bidang Layanan Umum dan Laporan seperti :

- Menyelenggarakan urusan surat masuk dan keluar, dan penggandaan;
- Menyelenggarakan penyusutan arsip yang telah memenuhi jadwal retensi arsip;
- Melakukan pemasangan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyelenggarakan kebersihan, keamanan dan upacara bendera;
- Menyusun bahan masukan konsep rencana strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan melaksanakan pembinaan kepada para pelaksana.

- b. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**, KPKNL Palu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil gunaterutama difokuskan pada kegiatan utilisasi BMN, pengukuran kinerja BMN, pengamanan BMN, dan penatausahaan BMN. Untuk tahun 2024, fokus pengelolaan kekayaan negara ditujukan pada utilisasi BMN, evaluasi kinerja BMN, dan sertifikasi terhadap 382 NUP objek tanah.
- c. **Seksi Pelayanan Piutang Negara**, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian pengurusan Piutang Negara/daerah baik kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara;

- d. **Seksi Hukum dan Informasi**, memiliki peran melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- e. **Seksi Kepatuhan Internal**, berperan dalam melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional di KPKNL Palu sesuai SK terdiri dari Pejabat Fungsional Pelalang, Penilai, dan Pranata Keuangan APBN, sedangkan Pejabat Juru Sita, Pemeriksa belum menjadi Pejabat Fungsional.
- Pelayanan Penilaian, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam melakukan penilaian BMN dan barang jaminan piutang negara dengan tujuan untuk menentukan Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN khususnya penghapusan BMN, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Selain itu KPKNL Palu juga membantu pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah (BMD), untuk menentukan nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan BMD;
  - Pelayanan Lelang, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam memberikan layanan lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara adil dan transparan. KPKNL Palu juga terus berupaya menjadikan lelang sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales means auction*) dengan melakukan penggalan potensi lelang dan menyebarluaskan cara penjualan lelang kepada masyarakat luas. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan

dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya produk hukum risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan PNBP berupa bea lelang. Saat ini KPKNL Palu juga sudah mengimplementasikan Lelang Internet (*e-auction*) yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya: lelang menjadi lebih mudah, dapat diakses di manapun dan kapanpun, lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi bagi para pesertanya, penawaran lebih cepat dilakukan karena penawaran lelang dapat dilakukan begitu pengumuman lelang sudah diunggah di situs lelang DJKN dan penawaran langsung diterima dalam hitungan detik, dan yang penting juga *e-auction* ini telah memberikan kontribusi hasil lelang yang lebih optimal dibandingkan dengan lelang konvensional.

## ISU STRATEGIS KPKNL PALU

Adapun Isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi pada KPKNL Palu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Isu Strategis Seksi PKN adalah:

- Berkoordinasi dengan satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara seperti pengelolaan BMN dan pemanfaatan BMN;
- Memberikan bimbingan teknis kepada satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam penggunaan aplikasi SIMAN Versi 2;
- Memberikan *reward* kepada satker K/L di wilayah Sulteng terhadap optimalisasi BMN yang dilakukan;
- Upaya pencapaian manfaat ekonomi Barang Milik Negara dalam bentuk penerimaan Negara bukan pajak dan penghematan biaya (*cost saving*); dan ;
- Membantu dan mengkoordinasikan pensertifikatan BMN berupa tanah pada satker di wilayah Sulteng sebanyak 382 NUP dengan 737 bidang tanah;
- Melaksanakan evaluasi kinerja BMN dan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK;
- Melakukan inventarisasi BMN Idle di Sulawesi Tengah.

2. Isu strategis Seksi Piutang Negara adalah:
  - Perlunya segera dilakukan sosialisasi serta upaya penegakan hukum Pengurusan Piutang Negara/Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengingat masih ada SKPD yang belum mengoptimalkan pengelolaan piutang negara/daerah dan;
  - Barang Jaminan yang kurang *marketable* sehingga piutang negara belum dapat terselesaikan.
3. Isu strategis Pelayanan Lelang adalah:
  - Mendukung terwujudnya kelancaran pelayanan lelang sebagai salah satu penerimaan PNB. Untuk itu perlu mengoptimalkan kinerja para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang dengan memberikan penyegaran bagi para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang, memberdayakan Balai Lelang, dan memaksimalkan penggunaan aplikasi penunjang lelang (e-Auction);
  - Mewujudkan keikutsertaan masyarakat luas untuk menggunakan lelang sebagai salah satu sarana jual/beli yang aman, mudah, transparan dan mendapat perlindungan hukum yang pasti dan ;
  - Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara/daerah yang lebih baik khususnya pemindahtanganan BMN dan/atau BMD.
4. Isu strategis Pelayanan Penilaian adalah:
  - Penilaian BMN dengan tujuan pengelolaan BMN dalam bentuk pemanfaatan, dan pemindahtanganan, serta turut andil dalam perolehan PNB dari pengelolaan BMN tersebut.
  - Adanya kepercayaan Aparat Pemeriksa Fungsional pada Pemerintah Daerah yang mempercayakan penilaian BMD dilakukan oleh Penilai KPKNL Palu, sehingga beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengajukan permohonan penilaian BMD dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD. KPKNL Palu dalam melaksanakan penilaian BMD tetap mengedepankan asas profesionalisme dengan mengutamakan tugas dan fungsi penilaian BMN. Dalam kurun waktu 2024 KPKNL Palu telah menyelesaikan permohonan penilaian BMD dengan menerbitkan 416 Laporan Penilaian dengan tujuan penilaian

adalah pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD;

- Kegiatan pembinaan penilai tetap perlu dilaksanakan agar penilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan diklat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi penilaian, diskusi, peer review, dan verifikasi kompetensi penilai pemerintah.

5. Isu strategis Subbagian Umum adalah:

- Berperan aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dalam rangka mendukung layanan unggulannya KPKNL Palu.
- Menata arsip-arsip yang berada pada gedung arsip yang berada di belakang kantor. Pendataan dan penataan ulang arsip tersebut membutuhkan waktu agar sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.
- Seiring dengan diterapkannya penggunaan tata naskah dinas secara elektronik maka diperlukan dukungan teknis di jaringan internet yang stabil. Begitu juga dengan pengelolaan arsip elektronik yang berbeda dengan pengelolaan arsip fisik.

6. Isu strategis Seksi Hukum dan Informasi adalah:

- Mewujudkan kelancaran penanganan/penyelesaian kasus perkara gugatan di pengadilan, penyajian informasi/kehumasan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara yang efektif;
- Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang cepat dan akurat, pengawasan sistem aplikasi yang terkendali serta pengelolaan jaringan komunikasi data yang baik sehingga informasi tersaji sesuai kebutuhan dan;
- Melaksanakan proses penerimaan hasil pengurusan piutang dan lelang serta penerimaan negara lainnya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

## TANTANGAN/HAMBATAN

- a. Luasnya Wilayah kerja.  
Luas provinsi Sulteng adalah  $\pm$  67.000 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1 Kota dan 12 Kabupaten. KPKNL Palu juga melayani 426 satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga, perbankan, kejaksaan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah sehingga koordinasi dengan pihak-pihak tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama, sedang biaya dan SDM yang tersedia terbatas.
- b. Terbatasnya SDM.  
Dengan beban kerja sebagaimana disebutkan pada poin a di atas dan cakupan wilayah yang luas, saat ini KPKNL Palu didukung oleh 29 pegawai, dimana 3 pegawai melakukan Tugas Belajar.
- c. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran satker dalam pengelolaan BMN karena kurangnya dukungan peraturan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu.
- d. Belum memadainya infrastruktur dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu seperti jaringan internet yang terkadang terkena kendala jaringan sehingga bandwidth menjadi lambat dan komputer pengolah data yang terbatas.
- e. Besarnya Piutang Daerah yang belum diurus sesuai ketentuan peraturan perundangan pada SKPD di Wilayah Sulawesi Tengah. Di samping itu Piutang Negara/Daerah yang telah diproses saat ini, banyak yang tidak didukung dengan kelengkapan data seperti data-data perusahaan bila Debitur/Penanggung Utang berbentuk badan hukum, serta barang jaminan yang bermasalah.
- i. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada Pejabat Lelang Kelas I, II, Balai Lelang dan stakeholder mengenai peralihan aplikasi lelang dari [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) ke [lelang.go.id](http://lelang.go.id) versi 2.
- j. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang dalam rangka penanganan perkara terkait sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas.

## SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan, yang menguraikan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi organisasi.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Bagian ini yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Palu Tahun 2024.

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang :

A. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

B. Kinerja lainnya

Bagian ini menguraikan kinerja lain yang dilakukan oleh KPKNL Palu selama Tahun 2024.

C. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV : Penutup

Bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan suatu proses yang dilakukan KPKNL Palu dalam menentukan strategi untuk melakukan kegiatan sesuai sistem. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi agar mempunyai keunggulan kompetitif, KPKNL Palu perlu menetapkan perjanjian kinerja dalam bentuk Kontrak Kinerja dengan seluruh pegawainya. Penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sepanjang tahun berjalan, dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala atas kinerja masing-masing pegawai dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.

Bimbingan dan konsultasi tersebut dilakukan oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang. Pada periode tahun berjalan juga dilakukan penilaian kinerja dan penilaian perilaku. Hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan umpan balik untuk proses pembimbingan dan konsultasi serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pada tahun 2024, KPKNL Palu memiliki 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan uraian dari 11 (Sebelas) Sasaran Strategis.

#### RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikiran tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam satu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

KPKNL Palu sebagai salah satu unit vertikal DJKN yang berada dibawah Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara memiliki rencana strategis untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang diharapkan, rencana strategis ini merupakan hasil turunan dari rencana strategis yang telah disusun oleh DJKN sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. KPKNL Palu berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara, dan pelayanan lelang, yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuannya, KPKNL Palu memiliki strategi yang akan ditempuh. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Selaras dengan Renstra DJKN tahun 2020-2024, strategi KPKNL Palu yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal dan produktif;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

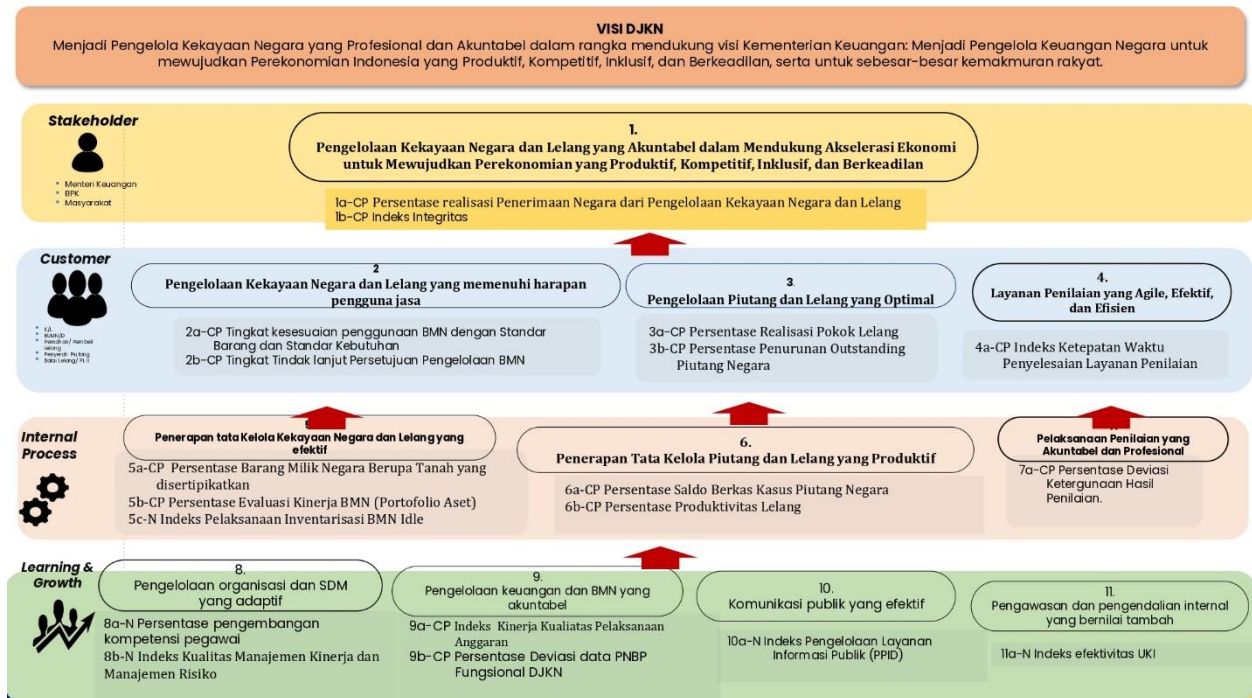
## PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Palu Tahun 2024 yang tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palu.

Bagan 2.1

Peta Strategi KPKNL Palu Tahun 2024



Pada Peta Strategi KPKNL Palu tersebut di atas menerapkan 4 perspektif, yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Dari 4 perspektif yang diterapkan, ditetapkan 11 Sasaran Strategis, antara lain : (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, (2) Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa, (3) Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal, (4) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien, (5) Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif, (6) Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif, (7) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, (8) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, (9) Pengelolaan keuangan yang akuntabel, (10) Komunikasi publik yang efektif, dan (11) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah. Selanjutnya dari sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 19 Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024. Keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp16,068 M)
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp194,1 M)
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp1,35 M)
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
		5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	45 (15 BKPN)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100

		9b-CP	Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82

## PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengelola kinerja organisasi dan kinerja pegawainya serta mengukur capaian kinerja pada tahun 2024, KPKNL Palu berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize, minimize, maupun stabilize;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang telah ditetapkan, akan diupayakan secara optimal dengan realisasi pencapaiannya yang memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

## PENJELASAN ADENDUM KONTRAK KINERJA

Pada tahun 2024 KPKNL Palu mendapatkan 1 (satu) kali addendum kontrak kinerja pada Triwulan IV. Penetapan addendum kontrak kinerja disampaikan Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalu melalui nota dinas ND-439/KNL.1603/2024 tanggal 23 Agustus 2024 hal Penyampaian Adendum RAW Data IKU Terkait Pengelolaan BMN dan Pengurusan Piutang Negara. Berdasarkan capaian kinerja triwulan II Tahun 2024, KPKNL Palu perlu melakukan penyesuaian RAW data target atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara, utamanya yang berasal dari PNBPN Piutang Negara dimana target Triwulan III yang semula Rp. 9.120.000 menjadi Rp. 15.180.000,-.

### BAB III

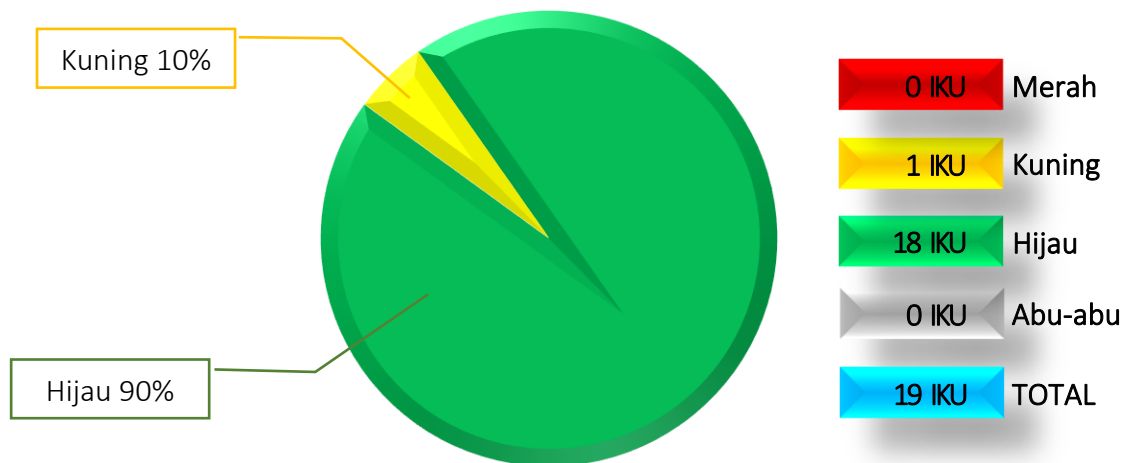
## AKUNTABILITAS KINERJA

### CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Palu tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palu adalah sebesar 114,91%.

Bagan 3.1

Diagram Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Palu Tahun 2024



Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada tiap perspektif sebagai berikut:

Tabel 3.1  
**Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Palu Tahun 2024**

NILAI KINERJA ORGANISASI  
 KPKNL Palu  
 PERIODE s.d Des (Q4) 2024

Kode	IKU	Polarisasi	W/C	Target	Realisasi s.d. Des (Q4)	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>											110,60
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan									110,60	
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%	170,80%	14,00%	42,42%	170,80	120,00	50,91	
1b-CP	Indeks Integritas	MAX	P/L	89,17	92,44	19,00%	57,58%	103,67	103,67	59,69	
<b>Customer Perspective (20%)</b>											113,17
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa									116,41	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	MAX	P/M	71,5%	83,81%	14,00%	50,00%	117,21	117,21	58,60	
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	MAX	P/M	86,5%	100,00%	14,00%	50,00%	115,61	115,61	57,80	
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal									103,10	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100%	86,19%	14,00%	50,00%	86,19	86,19	43,10	
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	MAX	P/M	100%	212,12%	14,00%	50,00%	212,12	120,00	60,00	
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									120,00	
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	MAX	P/M	75	97,76	14,00%	100,00%	130,35	120,00	120,00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>											117,78
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif									113,33	
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/M	100%	200,14%	14,00%	33,33%	200,14	120,00	40,00	
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100%	120,00%	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Ide	MAX	P/M	100,00	100,00	14,00%	33,33%	100,00	100,00	33,33	
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang									120,00	
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN	P/M	45,45%	36,36%	14,00%	50,00%	119,99	119,99	60,00	
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	89%	114,18%	14,00%	50,00%	128,29	120,00	60,00	
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional									120,00	
7a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	MIN	P/M	16%	0,51%	14,00%	100,00%	196,81	120,00	120,00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>											118,63
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif									116,72	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	90%	110,50%	14,00%	50,00%	122,78	120,00	60,00	
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	MAX	P/M	85	96,43	14,00%	50,00%	113,45	113,45	56,72	
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel									120,00	
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	MAX	P/M	100	120,00	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
9b-CP	Persentase deviasi data PNBSP fungsional DJKN	MIN	P/M	10%	0,00%	14,00%	50,00%	200,00	120,00	60,00	
10	Komunikasi publik yang efektif									120,00	
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPIID)	MAX	P/M	80	100,00	14,00%	100,00%	125,00	120,00	120,00	
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai									117,80	
11a-N	Indeks efektivitas UKI	MAX	P/M	82	96,60	14,00%	100,00%	117,80	117,80	117,80	
<b>NKO</b>											<b>114,91</b>

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-Three Tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three sebagai berikut :

**A. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) :**

- 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang**

Pada tahun 2024, target penerimaan negara berupa PNBPN pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar Rp16.065.200.000,00 dan telah tercapai realisasi penerimaan negara sebesar Rp27.439.781.694,00 atau sebesar 170,80% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.2  
**Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2024**

KPKNL Palu	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	393,09%	225,48%	225,48%	142,12%	142,12%	170,80%	170,80%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.3  
**Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2020-2024**

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
<b>2020</b>					
PNBP BMN	14.000.000.000	10.920.000.000	7.074.779.597	50,53%	64,79%
PNBP PN	4.200.000	2.000.000	3.953.935	94,14%	197,70%
PNBP Lelang	4.956.000.000	4.956.000.000	2.372.235.042	47,87%	47,87%
<b>2021</b>					
PNBP BMN	7.500.000.000		9.001.324.191	120,02%	
PNBP PN	8.000.000		126.139.920	1576,75%	
PNBP Lelang	3.430.000.000		4.647.936.643	135,51%	
<b>2022</b>					
PNBP BMN	11.230.000.000		15.393.400.543	137,07%	
PNBP PN	5.000.000		21.594.593	431,89%	
PNBP Lelang	3.400.000.000		5.382.148.782	158,30%	
<b>2023</b>					
PNBP BMN	9.210.000.000		20.194.518.623	219,27%	
PNBP PN	210.000.000		464.564.979	221,22%	
PNBP Lelang	5.400.000.000		4.397.100.919	81,43%	
<b>2024</b>					
PNBP BMN	10.600.000.000		22.665.360.337	213,82%	
PNBP PN	15.200.000		48.790.124	320,99%	
PNBP Lelang	5.450.000.000		4.725.631.233	86,71%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut

- Sosialisasi dan penggalan potensi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan dan penjualan BMN kepada para satuan kerja yang intens;
- Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah terkait realisasi PNBPN BMN, Biad PPN, dan Bea Lelang pada Aplikasi OM SPAN;
- Penggalan potensi lelang juga banyak dilakukan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);
- Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan penyerah Piutang Negara

## 2. 1b-CP Indeks Integritas

Indeks Integritas Organisasi merupakan IKU baru pada tahun 2023. Pada tahun 2024, target indeks integritas pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 89,17 dan telah tercapai sebesar 92,44 atau sebesar 103,67 % dari target yang dibebankan.

Tabel 3.4

### Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi Tahun 2024

KPKNL Palu	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		20	20	20	20	89,17	89,17	Max/ TLK
Realisasi		20	20	20	20	92,44	92,44	
Capaian		100%	100%	100%	100%	103,67%	103,67%	

Tabel 3.5

### Perbandingan Realisasi Indeks Integritas Organisasi Tahun 2023-2024

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2023	88,67		89,17	100,56%	
2024	89,17		92,44	103,67%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas, sebagai berikut :

- Secara rutin melakukan pemantauan Pengendalian Utama Layanan
- Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
- Melakukan Internalisasi Kode Etik dan kode Perilaku melalui kegiatan Sharing Knowledge.

- Melakukan pemantauan terhadap Pengaduan Masyarakat;
- Melakukan Profiling Pegawai

## B. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

### Indikator Kinerja Utama (IKU) :

#### 1. 2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Pada tahun 2024, tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 71,5% dan telah tercapai realisasi sebesar 83,81% atau sebesar 117,21 % dari target yang dibebankan.

Tabel 3.6

#### Capaian IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tahun 2024

KPKNL Palu	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Max/ TLK
Realisasi		85,99%	85,99%	82,71%	82,71%	83,81%	83,81%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	117,21%	117,21%	

Tabel 3.7

#### Perbandingan Realisasi Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tahun 2020-2024

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	419		427	101,91%	
2021	62%		74,53%	120,21%	
2022	65%		80,92%	124,49%	
2023	68%		82,45%	121,25%	
2024	71,5%		83,81%	117,21%	

Langkah-langkah yang diambil KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan satker khususnya satker Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan termasuk TNI.
- Melakukan pendampingan dalam pengisian formulir pendataan BMN.

- c. Melakukan cek fisik langsung bersama dengan satker dan melakukan perhitungan SBSK BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan kepada satuan kerja atas hasil pengukuran SBSK tahun 2024.

## 2. 2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pada tahun 2024, tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 86,5% dan telah tercapai realisasi sebesar 100% atau sebesar 115,61 % dari target yang dibebankan.

Tabel 3.8

### Capaian IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

KPKNL Palu	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24
Target		45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%	Max/ TLK
Realisasi		45,78%	45,78%	92,22%	92,22%	100%	100%	
Capaian		101,74%	101,74%	120%	120%	115,61%	115,61%	

Tabel 3.9

### Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	80%		88,64%	110,80%	
2021	85%		93,33%	109,80%	
2022	85%		95,45%	112,30%	
2023	86%		100%	116,28%	
2024	86,5%		100%	115,61%	

Langkah-langkah yang diambil KPKNL Palu dalam pencapaian target Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara ini, sebagai berikut :

- a. Mengingat satker yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN, baik pemindahtanganan maupun pemanfaatan, untuk segera meindaklanjuti persetujuan tersebut sebelum jangka waktu persetujuan berakhir.
- b. Membuat database rekapitulasi persetujuan pengelolaan BMN dan tindak lanjut yang telah dilakukan satker, antara lain berupa permohonan lelang untuk penjualan BMN, bukti setor PNBPN sewa aset untuk pemanfaatan BMN.

### C. Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) :

##### 1. 3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pada tahun 2024, persentase realisasi pokok lelang pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar Rp194.100.000.000,00 dan telah tercapai realisasi sebesar Rp167.298.653.929,00 atau sebesar 86,19% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.10

#### Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024

KPKNL Palu	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	77,39%	79,80%	79,80%	68,27%	68,27%	86,19%	86,19%	
Capaian	77,39%	79,80%	79,80%	68,27%	68,27%	86,19%	86,19%	

Tabel 3.11

#### Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2020-2024

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	127.950.000.000		90.826.812.445	70,99%	
2021	106.000.000.000		200.889.103.431	189,52%	
2022	103.000.000.000		205.513.408.617	199,53%	
2023	204.000.000.000		181.611.802.638	89,03%	
2024	194.100.000.000		167.298.653.929	86,19%	

Dalam pencapaian target realisasi pokok lelang ini, KPKNL Gorotalo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan,pegadaian, pemerintah daerah, dan satker Kementerian/Lembaga.
- Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online serta melalui media sosial.
- Melakukan sosialisasi portal lelang versi terbaru kepada pengguna jasa/stakeholder.

##### 2. 3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Pada tahun 2024, persentase penurunan outstanding piutang negara pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100 % (Rp1.350.000.000,00) dan telah tercapai realisasi sebesar Rp 2.863.572.455,00 atau sebesar 212,12% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.12

**Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2024**

KPKNL Palu	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal 3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	108,68%	148,00%	148,00%	61,99%	61,99%	212,12%	212,12%	
Capaian	108,68%	120%	120%	61,99%	61,99%	120%	120%	

Tabel 3.13

**Perbandingan Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2020-2024**

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	566.857.151		683.302.765,48	120,54%	
2021	1.662.000.000		2.301.476.642	138,48%	
2022	1.000.000.000		1.810.548.458	181,05%	
2023	6.886.134.353		7.687.266.007	111.63%	
2024	1.350.000.000		2.863.572.455	212,12%	

Dalam pencapaian target penurunan outstanding piutang negara ini, KPKNL Palu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang
- b. Melakukan penagihan secara langsung dengan pendekatan non eksekusi
- c. Melakukan penggalian potensi dan melakukan analisis PSBDT
- d. Melakukan sosialisasi door to door terkait Crash Program atau Pemberian Keringanan Hutang kepada seluruh Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi awal

**D. Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) :**

**1. 4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian**

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian merupakan IKU baru pada tahun 2023. Pada tahun 2024, target Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 75 dan telah tercapai sebesar 97,76 atau sebesar 130,35% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.14

**Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2024**

KPKNL Palu	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien 4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/ AVE
Realisasi	90,52	95,00%	148,00%	97,67%	97,67%	97,76%	97,76%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.15

**Perbandingan Realisasi Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2023-2024**

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2023	70		86,39	120%	
2024	70		97,76	130,35%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut :

- a. Mempercepat jangka waktu penyelesaian layanan penilaian terhadap permohonan penilaian
- b. Melibatkan pegawai yang berkompeten dari luar fungsional penilai sebagai anggota tim penilai untuk permohonan penilaian dengan jumlah objek penilaian yang banyak
- c. Meminta petunjuk/arahan dari Fungsional Penilai pada Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat DJKN terkait permohonan penilaian yang memiliki kompleksitas tinggi atau belum pernah dilakukan sehingga mempercepat Penyelesaian Layanan Penilaian.

**E. Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) :**

**1. 5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan**

Pada tahun 2024, target persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 737 bidang tanah dan telah tercapai sebesar 1.475 bidang tanah atau sebesar 200,14% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.16

**Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan**  
**Tahun 2024**

KPKNL Palu	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif 5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan
------------	--

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi		55,90%	55,90%	91,04%	91,04%	200,14%	200,14%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.17

**Perbandingan Realisasi Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang  
Disertipikatkan Tahun 2020-2024**

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	62 bidang		62 bidang	100%	
2021	1.638 bidang		1.742 bidang	106,35%	
2022	2.858 bidang		3.436 bidang	120,22%	
2023	604 bidang		860 bidang	142,38%	
2024	737 bidang		1.475 bidang	200,14%	

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kanwil BPN Sulawesi Tengah dan kantor pertanahan di wilayah kerja KPKNL Palu;
- b. Melakukan koordinasi secara formal dan informal kepada satker di wilayah kerja KPKNL Palu yang menjadi target sertifikasi tanah, termasuk pendampingan langsung untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah.

**2. 5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Pada tahun 2024, target persentase evaluasi kinerja bmn (portofolio aset) pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 167 NUP dan telah tercapai sebesar 212 NUP atau sebesar 120% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.18

**Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2024**

KPKNL Palu	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif 5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	14,36%	53,14%	53,14%	94,14%	94,14%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	117,67%	117,67%	120%	120%	

Tabel 3.19

**Perbandingan Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020-2024**

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
--------------	-------------	----------------	-----------	-----------------	--------------------

2020	58 NUP		62 NUP	106,90%	
2021	27 NUP		34 NUP	125,93%	
2022	196 NUP		212 NUP	110,74%	
2023	157 NUP		165 NUP	120%	
2024	167 NUP		212 NUP	120%	

Dalam pencapaian target evaluasi kinerja BMN, KPKNL Palu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap satker yang menjadi target evaluasi kinerja BMN;
- Melakukan pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan;
- Melakukan survei lapangan evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

### 3. 5c-N Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle

Pada tahun 2024, terdapat BMN Eks BMN Idle berupa 4 bidang tanah dan 1 unit bangunan yang menjadi target untuk dilaksanakan inventarisasi, semua BMN dimaksud telah selesai dilakukan inventarisasi di tahun 2024 sehingga capaian sebesar 100%.

## F. Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

### 1. 6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Pada tahun 2024, target saldo berkas kasus piutang negara pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 45,45% dan telah tercapai sebesar 36,36% atau sebesar 119,99% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.20

#### Capaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2024

KPKNL Palu	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	97%	91%	91%	91%	91%	45,45%	45,45%	Max/ TLK
Realisasi	96,97%	87,88%	87,88%	63,64%	63,64%	36,36%	36,36%	
Capaian	100,03%	103,43%	103,43%	120%	120%	119,99%	119,99%	

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Palu, sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang;
- Melakukan penagihan secara langsung dengan pendekatan non eksekusi;
- Melakukan penggalan potensi dan melakukan analisis PSBDT;
- Melakukan sosialisasi door to door terkait Crash Program atau Pemberian Keringanan Hutang kepada seluruh Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi awal

## 2. 6b-CP Persentase produktivitas lelang

Pada tahun 2024, target saldo berkas kasus piutang negara pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 89% dan telah tercapai sebesar 114,18% atau sebesar 128,29% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.21

### Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2024

KPKNL Palu	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif 6b-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	45%	45%	89%	89%	Max/ TLK
Realisasi	59,07%	77,10%	77,10%	93,15%	93,15%	114,18%	114,18%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.22

### Perbandingan Realisasi Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2020-2024

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	34%		42,62%	125,35%	
2021	35%		40,95%	117,01%	
2022	36%		98,51%	273,64%	
2023	80%		105%	120%	
2024	89%		114,18%	128,29%	

Dalam rangka meningkatkan produktivitas lelang pada tahun 2024, KPKNL Palu telah melakukan upaya sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat, terkait akun Mitra Kantor Pertanahan untuk penerbitan SKPT yang bermasalah.
- Memberikan Himbauan kepada pengguna jasa/pemohon lelang, khususnya perbankan dalam rangka mitigasi lelang batal khususnya lelang eksekusi Hak Tanggungan.
- Percepatan verifikasi dokumen lelang, sehingga semakin banyak permohonan lelang yang masuk dengan harapan semakin banyak lelang yang dilaksanakan.
- Melakukan publikasi terkait pelaksanaan lelang online serta melalui media sosial.

## G. Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

### Indikator Kinerja Utama (IKU) :

#### 1. 7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Pada tahun 2024, target persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 16% dan telah tercapai sebesar 0% atau sebesar 200% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.23

#### Capaian IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2024

KPKNL Palu	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Max/ AVE
Realisasi	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.24

#### Perbandingan Realisasi Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020-2024

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	30%		1,37%	195,43%	
2021	12,5%		0%	200%	
2022	19%		0%	200%	
2023	25%		0,15%	200%	
2024	16%		0%	200%	

## H. Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

### Indikator Kinerja Utama (IKU) :

#### 1. 8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pada tahun 2024, target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 90% dan telah tercapai sebesar 110,50% atau sebesar 122,78% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.25

#### Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2024

KPKNL Palu	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	60%	60%	60%	16%	90%	90%	Max/ TLK
Realisasi	72,40%	97,40%	97,40%	119%	0 %	110,50%	110,50%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.26

**Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2024**

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	100%		120%	120%	
2021	100%		120%	120%	
2022	100%		120%	120%	
2023	-		-	-	
2024	90%		110,50%	122,78%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut :

- Menyusun pedoman program pengembangan kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca kegiatan pengembangan kompetensi.
- Memberikan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Menciptakan kolaborasi yang baik dengan seluruh pengampu kegiatan bimbingan mental yang mencakup bidang rohani, kompetensi, ideologi, dan kejiwaan.

**2. 8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

Pada tahun 2024, target indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 85 dan telah tercapai sebesar 96,43 atau sebesar 113,45% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.27

**Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2024**

KPKNL Palu	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	97,96	93,95	93,95	93,95	93,95	96,43	96,43	96,43	
Capaian	115,24%	109,47%	109,47%	109,47%	109,47%	113,45%	113,45%	113,45%	

Tabel 3.28

**Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2023-2024**

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2023	80		96,58	120,72%	
2024	85		96,43	113,45%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu untuk mendapatkan kinerja dan risiko yang berkualitas, sebagai berikut :

- a. Untuk kinerja pegawai, telah dilakukan edukasi secara terus menerus kepada seluruh pegawai mengenai manajemen kinerja yang baik, terukur, dan berkontribusi pada kinerja organisasi.
- b. Melakukan dokumentasi perencanaan manajemen kinerja organisasi dan risiko;
- c. Melakukan monitoring data capaian kinerja organisasi;
- d. Mengkompilasi Rencana Aksi dan Mitigasi pencapaian target kinerja pada masing-masing unit.

## **I. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel**

### **Indikator Kinerja Utama (IKU) :**

#### **1. 9a-CP Indeks Kinerja Anggaran**

Untuk indeks kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Palu telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 120,00 dari target 100,00. Bila dibandingkan tahun sebelumnya mencapai realisasi sebesar 95,61% dari target 100,00%. Dalam IKU ini digunakan Formula Konversi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Triwulan IV berupa  $NKA > 95,00$  untuk indeks 120,00 dengan Realisasi NKA KPKNL Palu Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,81. Hasil NKA diambil dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan perhitungan unsur nilai revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, data konfirmasi Capaian Output, dan dispensasi SPM sebagai nilai pengurang.

Selama tahun 2024 KPKNL Palu telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik dan berhasil. Pelaksanaan anggaran yang telah optimal ini harus menjadi evaluasi agar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik, terencana, dan terorganisir dengan baik serta mengacu pada kontrak kinerja Kemenkeu-three. Kendala yang dialami yaitu nilai penyerapan anggaran atas pagu belanja barang (52) yang kurang terpenuhi dengan terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait perhitungan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berjalan. Karena itu, KPKNL Palu berupaya melakukan pemetaan RPD yang lebih terstruktur dan mengintruksikan seluruh unit untuk membuat rencana kerja berupa perjalanan dinas dan belanja bahan maupun operasional lainnya secara bertahap.

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan KPKNL Palu berasal sepenuhnya dari APBN yang dituangkan dalam DIPA nomor SP DIPA-015.09.2.538002/2024 Tanggal 28 November 2023 yang terinci dalam tabel berikut.

Tabel 3.29

## Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan KPKNL Palu

No	Uraian	Pagu DIPA	Blokir	Sisa Pagu	Realisasi	
					Rp	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
2	Belanja Barang	2.407.308.000	14.647.000	78.620.241	2.328.687.759	96,73
3	Belanja Modal	585.078.000	0	9.000	585.069.000	100,00
Total		2.992.386.000	14.647.000	78.629.241	2.913.756.759	97,37

Pada tahun 2024, KPKNL Palu tidak memiliki DIPA untuk Belanja Pegawai, besarnya realisasi DIPA untuk tahun 2024 adalah sebesar 2.913.756.759,00 dari target sebesar 2.679.965.100,00. Realisasi penyerapan DIPA untuk Tahun Anggaran 2024 dimaksud telah sesuai digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, dan dari aspek keuangan itu sendiri telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara.

Pada tahun 2024, target indeks kinerja anggaran pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 100,00 dan telah tercapai sebesar 120,00 atau sebesar 120% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.30

## Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2024

KPKNL Palu	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel							
	9a-CP Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	104,41	104,41	120	120	120	120	
Capaian	120%	104,41%	104,41%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.31

## Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	95%		96,34%	101,41%	
2021	95,5%		96,34%	100,16%	
2022	95,5%		96,85%	101,41%	
2023	100%		95,61%	95,61%	
2024	100		120	120%	

Langkah-langkah KPKNL Palu dalam mencapai target tersebut, sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan anggaran dengan baik dan detil dengan melibatkan seluruh unit terkait;
- b. Mendorong realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang ditetapkan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sebagai bahan pertimbangan penyesuaian strategi atau revisi anggaran.

## 2. 9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Pada tahun 2024, target persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 10% dan telah tercapai sebesar 0% atau sebesar 200% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.32

### Capaian IKU Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2024

KPKNL Palu	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel							
	9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Max/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.33

### Perbandingan Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2020-2024

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2020	-		-	-	
2021	12,5%		0%	120%	
2022	10%		0%	200%	
2023	15%		0%	120%	
2024	10%		0%	200%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam meminimalkan deviasi data PNBP Fungsional DJKN, sebagai berikut :

- a. Memastikan pemahaman yang memadai dan ketelitian dari petugas dalam membukukan transaksi dalam aplikasi Dropbox dan Focus PN.
- b. Melakukan update data transaksi pada aplikasi OM-SPAN untuk diinput dan dimonitor ke Dropbox DJKN.
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan lelang ke dalam aplikasi Dropbox.

**J. Sasaran Strategis 10: Komunikasi Publik yang Efektif**

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

**1. 10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

Pada tahun 2024, target indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 80 dan telah tercapai sebesar 100 atau sebesar 120% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.34

**Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2024**

KPKNL Palu	Komunikasi Publik yang Efektif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	110	100	100	100	100	100	100	
Capaian	137,5%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 3.35

**Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2023-2024**

Tahun/Uraian	Target Awal	Target Adendum	Realisasi	%Realisasi Awal	%Realisasi Adendum
2023	100		100	100%	
2024	80		100	120%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut :

- Melakukan pelaporan informasi publik secara tepat waktu.
- Melakukan penyediaan informasi publik dan pemutakhiran informasi publik secara berkala pada Website dan Media Sosial Resmi Kantor.
- Menyampaikan informasi publik atas permintaan pengguna layanan secara tepat waktu.

**K. Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah**  
Indikator Kinerja Utama (IKU) :**1. 11a-N Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)**

Pada tahun 2024, target indeks efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada KPKNL Palu telah ditetapkan sebesar 82 dan telah tercapai sebesar 96,60 atau sebesar 117,80% dari target yang dibebankan.

Tabel 3.36

**Capaian IKU Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tahun 2024**

KPKNL Palu	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11a-N Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		15	15	15	15	82	82	Max/ TLK
Realisasi		15	15	15	15	96,60	96,60	
Capaian		100%	100%	100%	100%	117,80%	117,80%	

Langkah-langkah strategis KPKNL Palu dalam pencapaian target, sebagai berikut :

- a. Secara rutin melakukan pemantauan Pengendalian Utama Layanan.
- b. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
- c. Sharing Knowledge Kode Etik dan kode Perilaku kepada Pegawai.
- d. Melakukan pemantauan terhadap Pengaduan Masyarakat.
- e. Memberikan himbauan dalam pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan (internal dan eksternal)

#### ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

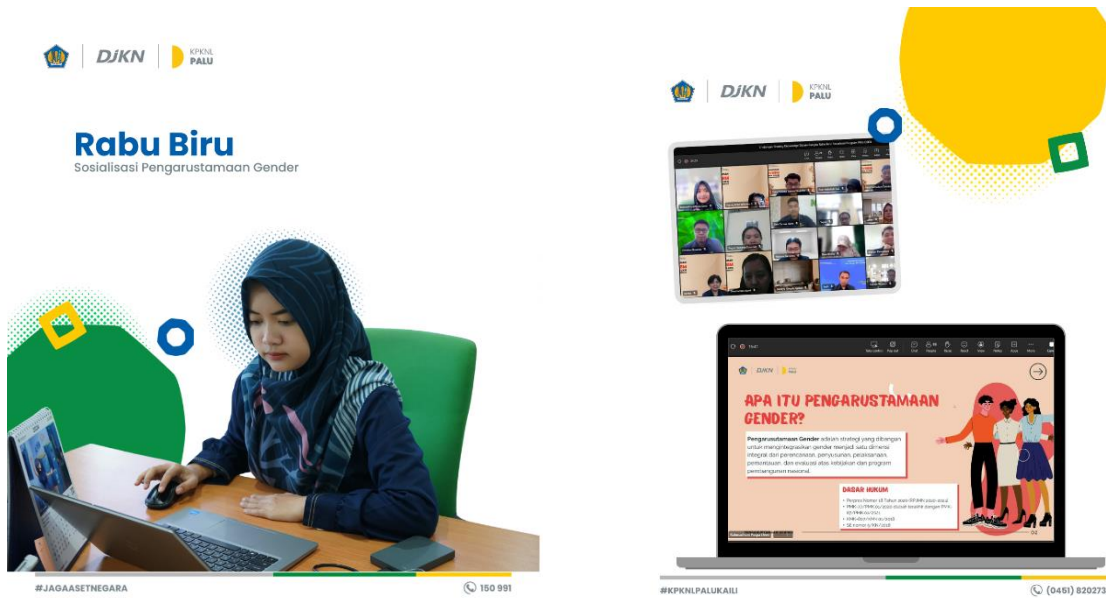
1. Kuasa Pengguna Barang (KPB) belum sepenuhnya tertib, disiplin, serta tanggung jawab dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN. Kondisi tersebut dapat coba diatasi dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan komunikasi, serta pendampingan secara intens untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.
2. Pelaksanaan program sertifikasi BMN berupa tanah masih terkendala oleh data tanah satker yang menjadi target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batasbatas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid. KPKNL Palu selalu melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertipikat.
3. KPKNL Palu kerap melakukan sharing knowledge dalam bentuk edukasi dan komunikasi baik secara internal, maupun kepada eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamika regulasi terkait pengelolaan BMN, peraturan lelang, penilaian, serta piutang negara dengan harapan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.

4. Dalam pengelolaan BKPN, Seksi Piutang Negara kerap melakukan penelitian dan mempelajari kembali Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang berpotensi untuk dapat diselesaikan dengan kegiatan pemeriksaan berkas maupun *stock opname*, melakukan kegiatan penagihan kepada debitur baik secara langsung maupun tidak langsung, serta giat mensosialisasikan secara masif adanya crash program keringanan utang melalui berbagai sarana.
5. KPKNL Palu melakukan publikasi melalui berbagai saluran media baik media online, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan, dengan memberikan penjelasan bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL memang secara prinsip adalah untuk kondisi fisik apa adanya, sehingga calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, tidak berhenti disitu, KPKNL juga terus menyampaikan bahwa meskipun secara fisik dijual apa adanya, tetapi secara dokumen formil telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang sehingga dirasa lebih aman bagi calon pembeli. Pelaksanaan lelang dengan *e-auction* memastikan bahwa proses lelang berjalan secara lebih adil dan transparan

## KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2024, KPKNL Palu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan demi memberikan pelayanan yang baik dan mengedepankan pengarusutamaan gender. KPKNL Palu juga melaksanakan sosialisasi terkait Pengarusutamaan Gender dan memelihara fasilitas penunjang Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti area bermain dan ruang laktasi di area pelayanan terpadu, menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, mengadakan sosialisasi kesehatan kepada pihak eksternal. Adapun komposisi pegawai di KPKNL Palu terdiri dari 19 pegawai laki-laki dan 10 pegawai perempuan.

### Kegiatan sosialisasi tentang Pengarustamaan Gender



### Kegiatan Sosialisasi tentang kesehatan kepada siswa tingkat SMP dalam kegiatan Kemenkeu Satu Negeri Kota Palu



## REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan diarahkan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan dana seoptimal mungkin. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan 31 Desember 2024 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Palu pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.913.756.759,00 atau 97,37% dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Palu sebesar Rp2.992.386.000. Realisasi penggunaan anggaran DIPA tahun 2024 secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37

### Realisasi Anggaran KPKNL Palu Tahun 2024 per Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Penyerapan
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	2.407.308.000	2.328.687.759	96,73%
Belanja Modal	585.078.000	585.069.000	100%
Total	2.992.386.000	2.913.756.759	97,37%

Tabel 3.38

### Realisasi Output KPKNL Palu Tahun 2024

Output (satuan)	Pagu	Realisasi	Penyerapan
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	230	323	140,43%
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	91	154	169,23%
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	95	130	136,84%
Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	1849	1849	100%
Rekomendasi Hasil Penilaian	1	1	100%
Aset BUN yang Dikelola	9	12	133,33%
Risalah Lelang	400	659	164,75%
Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	20	22	110%
Penggalian Potensi Lelang	3	6	200%
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	10	14	140%
Layanan Bantuan Hukum	12	14	116,67%
Kehumasan	24	42	175%
Pembinaan/Edukasi Publik	30	30	100%
Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	5	100%

Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	36	36	100%
Kerumahtanggaan	12	12	100%
Layanan Perkantoran	12	12	100%
Kendaraan Bermotor	1	1	100%
Fasilitas Perkantoran	12	9	75%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	14	14	100%

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah merupakan amanat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 bahwa Menteri/Pimpinan lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut KPKNL Palu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, yang merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban hasil perjanjian kinerja yang telah disepakati antara pimpinan dan bawahan dari sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan yang diberikan dalam melakukan pengelolaan dan penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, dan sekaligus berperan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka peningkatan good governance yang mengacu pada rencana strategis KPKNL Palu lima tahunan (2020-2024). Pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 19 IKU yang merupakan indikator Kontrak Kinerja KPKNL Palu tahun 2024.

Secara umum, seluruh pencapaian sasaran strategis selama tahun 2024 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tanpa ada satu IKU pun yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja secara keseluruhan tersebut merupakan hasil kerja seluruh staf, pegawai dan pejabat di jajaran KPKNL Palu termasuk pegawai pemerintah non pegawai negeri serta pegawai outsource.

Keberhasilan tersebut diantaranya adalah:

- Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2024 sebesar Rp27.439.781.694,00 (170,80%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp16.065.200.000,00, IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang.
- Persentase penyerapan DIPA tahun 2024 mencapai 96,73% dari target 90,00% (Barang). Capaian target tersebut berhasil diraih dan harus dijadikan evaluasi agar tahun depan pelaksanaan persentase penyerapan dapat dilaksanakan dengan eksekusi yang lebih terencana dan terorganisir dengan baik dan mengacu pada kontrak kinerja.

Dengan menganalisa IKU tersebut, maka dapat dibuat Action Plan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada KPKNL Palu pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan jumlah frekuensi lelang pada tahun 2024, KPKNL Palu akan melakukan penggalan potensi lelang ke instansi/lembaga yang beragam dan sosialisasi serta penyebaran informasi ke masyarakat umum.

Sedangkan berkaitan dengan pengurusan piutang negara, pada tahun 2024 KPKNL Palu akan lebih mengoptimalkan penegakan hukum dalam pengurusan Piutang Negara Kementerian dan Lembaga dan Piutang Daerah. Khusus Piutang Daerah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Anggota PUPN Cabang yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah yang merupakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diharapkan pada tahun 2024 akan lebih ditingkatkan baik proses penilaian dan pengelolaan maupun edukasi kepada instansi pengguna layanan. Perlu sinergi dalam melakukan peran DJKN dalam pengelolaan BMN sehingga diharapkan memberi dampak bagi penerimaan Negara, dan aset Negara dapat dioptimalkan agar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat

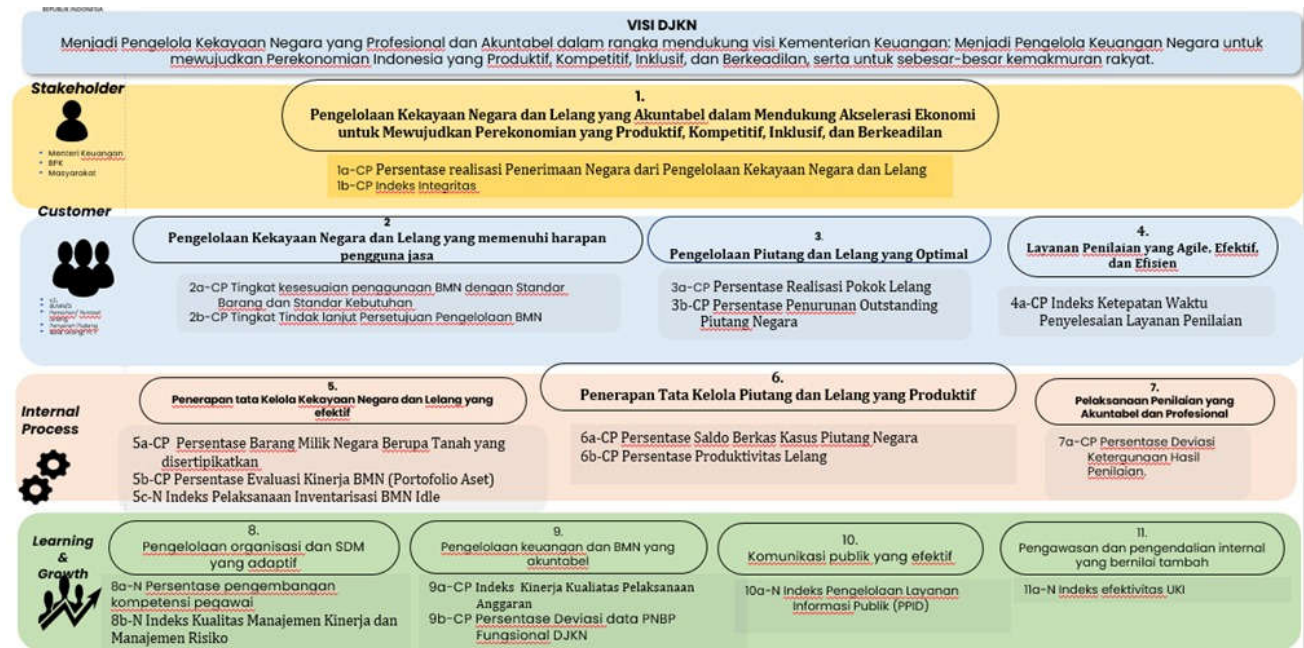
Kiranya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pedoman yang harus diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada periode berikutnya, sehingga di masa yang akan datang KPKNL Palu dapat semakin tampak potensinya, meningkatkan kinerjanya, dan makin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan yang profesional.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-03/WKN.16/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 100 (Rp16,068 M)
		1b-CP	Indeks Integritas 89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan 71,5
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN 86,5
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang 100 (Rp194,1 M)
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara 100 (Rp1,35 M)
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian 75
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan 100
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 100
		5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle 100
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara 45 (15 BKPN)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang 89
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 16
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 90
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko 85
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		9b-CP Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N Indeks Efektivitas UKI	82

#### Program/Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Komunikasi. Edukasi. dan Standardisasi	19.377.000
2	Pengelolaan Aset	513.208.000
3	Legislasi dan Litigasi	74.780.000
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.236.549.000
5	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	46.896.000
6	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	73.656.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Dan Maluku Utara

Kepala Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Palu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo  
NIP 197209021993011001



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jerry Max Nelson Piri  
NIP 196803291991031001



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	45	45	-	45	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	91	91	82	82	45	45
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor  
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Palu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jerry Max Nelson Piri  
NIP 196803291991031001



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	Jerry Max Nelson Piri	1	NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo
2	NIP	196803291991031001	2	NIP <i>(*opsional)</i>	197209021993011001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
4	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. UTAMA					
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Target 1.1 100	<i>Penerima Layanan</i>	
		IKI 1.2 Indeks Integritas	Target 1.2 89,17	<i>Penerima Layanan</i>	

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 2.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Target 2.1 71,5	<i>Penerima Layanan</i>
		IKI 2.2 Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	Target 2.2 86,5	<i>Penerima Layanan</i>
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 3.1 Persentase Realisasi Pokok Lelang	Target 3.1 100	<i>Penerima Layanan</i>
		IKI 3.2 Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Target 3.2 100	<i>Penerima Layanan</i>
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 4.1 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	Target 4.1 75	<i>Penerima Layanan</i>
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	IKI 5.1 Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	Target 5.1 100	<i>Proses Bisnis</i>

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 5.2 Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Target 5.2 100	<i>Proses Bisnis</i>
		IKI.5.3 Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	Target 5.3 100	<i>Proses Bisnis</i>
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 6.1 Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	Target 6.1 45	<i>Proses Bisnis</i>
		IKI 6.2 Persentase Produktivitas Lelang	Target 6.2 89	<i>Proses Bisnis</i>
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 7.1 Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Target 7.1 16	<i>Proses Bisnis</i>
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 8.1 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Target 8.1 90	<i>Penguatan Internal / Anggaran</i>
		IKI 8.2 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Target 8.2 85	<i>Penguatan Internal / Anggaran</i>

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 9.1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target 9.1 100	<i>Penguatan Internal / Anggaran</i>
		IKI 9.2 Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	Target 9.2 10	<i>Penguatan Internal / Anggaran</i>
10	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 10.1 Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Target 10.1 80	<i>Penguatan Internal / Anggaran</i>
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara)	IKI 11.1 Indeks Efektivitas UKI	Target 11.1 82	<i>Penguatan Internal / Anggaran</i>
B. TAMBAHAN				
1	Komunikasi Publik yang Efektif	IKI 1 Persentase Penyampaian dan Pengintegrasian Data terkait Pengelolaan Kekayaan Negara dan Investasi Pemerintah pada ALCo Regional Sulawesi Tengah	Target 1 100	<i>Penguatan Internal / Anggaran</i>
PERILAKU KERJA*				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

PERILAKU KERJA*		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan menaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan menaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA*		
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif dan kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	

Pegawai yang Dinilai

Jakarta, 30 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Max Nelson Piri  
196803291991031001



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo  
197209021993011001

\* Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi khusus terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja Pegawai.



## LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:

01 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN  
2024

## DUKUNGAN SUMBER DAYA

- |    |  |
|----|--|
| 1. | 29 pegawai   |
| 2. | <i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i> |

## SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> |
|----|---|

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
2.	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
4.	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
5.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
7.	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8.	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
9.	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100

No	IKI	Target						
		25	55	55	70	70	100	100
10.	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100
11.	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97	91	91	82	82	45	45
12.	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
13.	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
14.	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90
15.	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
16.	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
18.	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19.	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai

Jakarta, 30 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Jerry Max Nelson Piri  
196803291991031001



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo  
197209021993011001

